

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI KOTA SEMARANG

Eta Yuni Lestari¹, Nugraheni Arumsari²

etayuni@mail.unnes.ac.id, nugraheni.arum@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukada maupun pada pemilihan presiden pada tahun 2019, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui kesiapan para pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang.

Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang pada tahun 2015 di Kota Semarang. Sasaran penelitian ini adalah para pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota Semarang, adapun sampel penelitian adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang merupakan pemilih pemula di kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh visi dan misi ketika terpilih, latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat, kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon *incumbent*), dan kinerja pada pekerjaannya, *Track record* calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).

Kata Kunci: partisipasi politik, pemilih pemula, pemilukada

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik dalam negara yang menjadi dambaan, khususnya bagi orang yang mempunyai kesadaran politik untuk dapat diwujudkan kedalam perbuatan sehari-hari. Di Indonesia, demokrasi sangatlah

dibangga-banggakan, dianggap paling ideal karena memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat, memberi peluang pada mereka untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, mengutarakan pendapat, mendirikan

^{1,2}Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

organisasi yang bernilai positif yang tidak merugikan masyarakat.

Berbicara tentang demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis, sebuah kegiatan politik sangat diperlukan. Seperti yang kita ketahui perjalanan demokrasi politik di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sejak masa pasca-kemerdekaan hingga sekarang, yaitu mengenai pemerintahan parlementer (*presentative democracy*), pemerintahan demokrasi dipimpin (*guided democracy*), dan pemerintahan orde Baru (*Pancasila Democracy*) (Gaffar, 2006:10). Perubahan sistem pemerintahan ini memiliki tujuan untuk membangun demokrasi yang benar-benar ideal dan pas untuk diterapkan di Indonesia. Maka diharapkan konsekuensi logis dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia tentunya membawa perubahan sistem politik di Indonesia, yang tentunya membawa dampak bagi jalannya pemerintahan.

Salah satu wujud pelaksanaan negara yang demokratis adalah dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai sarana demokratisasi telah digunakan di sebagian negara tidak terkecuali Indonesia yang *nota bene* memiliki masyarakat yang heterogen. Pemilu sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang dinilai sebagai wujud atau parameter suatu negara demokratis atau tidak, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, karena masih terdapat manipulasi politik, kecurangan, ketidakadilan, mobilisasi, *money politic*, yang menimbulkan persoalan yang

berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi jalannya pemerintahan.

Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tujuan untuk memilih anggota Legislatif dan Eksekutif (Presiden/Kepala Daerah). Sejak Juni 2004, terdapat revolusi besar-besaran, mengikuti pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bulan Juni 2005 proses pemilihan kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang sebelumnya dipilih oleh DPRD berganti dipilih secara langsung oleh rakyat dengan harapan mengembalikan kedaulatan pada pemiliknya. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari praktik *money politics* dan reduksi dari para elit partai dalam pemilihan kepala daerah.

Tahun 2014 mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengalami perubahan, dari memilih secara langsung menjadi secara perwakilan melalui DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dikembalikan kembali kepada rakyat, yaitu pemilihan secara langsung.

Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan Pemilukada secara langsung merupakan wujud demokrasi formal. Dari tahun 2005 pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah mengalami hambatan dan menimbulkan berbagai macam konflik, baik konflik secara vertikal maupun secara horizontal, misalnya, berubahnya tujuan Pemilukada yang dijadikan sebagai ajang untuk mengumpulkan dana partai politik, kecurangan, *money politic*, biaya yang sangat mahal, rendahnya partisipasi pemilih, sengketa Pemilukada, dll.

Persoalan yang sering muncul terkait proses pemilukada adalah masih rendahnya partisipasi pemilih. Hasil survey pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014, menyatakan bahwa 43% pemilih pada tahun 2014 adalah pemilih pemula (Perludem, 2014). Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Hal ini yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik pemilih pemula.

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Tahun 2015 Kota Semarang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih walikota. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan

menggunakan hak pilih lagi pada pemilihan presiden tahun 2019. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilukada di Kota Semarang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilukad, maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dirancang dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah di Kota Semarang, dengan sampel penelitian adalah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang khususnya semester 1 dan 3 yang akan menggunakan hak pilih yang pertama kali pada pemilihan Walikota Semarang. Peneliti menjadikan sampel penelitian karena mahasiswa semester 1 dan 3 tergolong dalam pemilih pemula, yang baru pertama kali menggunakan hak pilih untuk memilih Calon Walikota Semarang.

Untuk menggali data digunakan angket secara mendalam untuk memperoleh informasi tentang pendidikan politik pemilih pemula pada pemilihan Walikota Semarang. Peneliti juga akan menggabungkan sumber opini lain sebagai penguat argumentasi, yakni menggunakan data sekunder yang diambil dari Buku,

Majalah, Jurnal yang terkait untuk pengembangan analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitian ini didapatkan hasil mengenai kesiapan pemilih pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan pada pemilihan walikota (pemilihan wali kota) kota Semarang, yaitu:

1) Partisipasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilih

Kesiapan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang diungkap dengan pertanyaan tentang pengetahuan responden tentang pelaksanaan pemilihan wali kota Semarang. Sebagian besar responden mengetahui bahwa Kota Semarang akan menyelenggarakan pemilihan Wali Kota Semarang. Pemahaman responden yang merupakan pemilih pemula tentang pelaksanaan Pemilihan walikota Semarang ternyata masih ada yang tidak tahu pasti tanggal penyelenggaraan pemilihan wali kota Semarang. Pelaksanaan pemilihan wali kota Semarang merupakan implementasi pertama pilkada serentak, yang masih banyak menuai perdebatan terkait kesiapan Negara dalam melaksanakan pilkada serentak, baik mengenaik teknis pelaksanaan, konflik pemilihan umum, sengketa hasil pemilihan umum, dan upaya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum pemilihan walikota.

Kesiapan pemilih pemula juga dilihat dari pengetahuan calon pemilih pada kontestan pemilihan wali kota Semarang, dari hasil penelitian responden

sebagian besar sudah mengetahui kontestan pemilihan wali kota Semarang, walaupun ada juga yang belum tahu secara pasti dari nama-nama kontestan pemilihan wali kota Semarang. Pemahaman pemilih terhadap kontestan pemilihan wali kota Semarang, sudah pasti mempengaruhi calon pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang. Hasil penelitian tentang kesiapan pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan wali kota Semarang, calon pemilih sebagian besar akan menggunakan hak pilihnya. Alasan menggunakan hak pilih pada pemilihan wali kota Semarang adalah kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota Semarang. Calon pemilih pada umumnya memiliki rasa penasaran dan keinginan untuk mengikuti kegiatan politik yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali tersebut.

Kesiapan calon pemilih dalam menggunakan hak pilih ditentukan oleh berbagai faktor baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam dipengaruhi oleh kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan wali kota Semarang, sedangkan faktor dari luar pemilih dipengaruhi oleh faktor visi dan misi kontestan pemilihan wali kota, program, *track record* kontestan, latar belakang kontestan, dan pengaruh dari orang lain misalnya orang tua pemilih.

Persiapan yang dilakukan pemilih untuk menentukan pilihan pada pemilihan walikota Semarang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih mencari informasi terkait hal-hal sebagai berikut ;

1. Visi dan misi calon
2. *Track record* calon
3. Sesuai dengan keyakinan calon
4. Latar belakang pendidikan calon
5. Kesiapan secara administrasi
6. Menambah pengetahuan pemilih dengan belajar tentang konsep pemilu yang LUBER JURDIL
7. Mengikuti kegiatan sosialisasi calon dalam acara kampanye, baik melalui media kampanye, maupun sosialisasi secara langsung oleh calon
8. Melihat kinerja para calon, baik calon *incumbent* maupun calon baru

Selain alasan tersebut di atas ada beberapa responden yang sampai sekarang belum menentukan pilihan, sehingga tidak ada kesiapan sama sekali dalam menentukan pilihan karena alasan belum mengenal kepribadian dari calon walikota. Bahkan ada juga responden yang sama sekali tidak mempersiapkan diri secara khusus dalam menggunakan hak pilih. Hal ini dikarenakan adanya faktor tidak percaya terhadap para calon walikota Semarang, mereka menganggap bahwa tidak ada perubahan yang berarti setelah mereka menggunakan hak pilih mereka, tidak heran jika responden sampai sekarang ada yang tidak menyiapkan secara khusus dalam menggunakan hak pilih walikota Semarang.

Kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih salah satunya dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan dan pendidikan politik yang mereka miliki. Pengetahuan responden tentang pemilihan walikota ternyata masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait pemilihan walikota Semarang, baik sosialisasi dari

KPU, dari calon walikota, maupun dari lembaga-lembaga lainnya. Pemilih mendapatkan informasi tentang pemilihan walikota Semarang dari media massa, internet, serta dari media kampanye seperti baliho, liftlet, yang digunakan calon walikota Semarang untuk mempromosikan visi dan misi calon walikota Semarang.

Media kampanye sering digunakan untuk menarik massa pemilih dan dianggap efektif untuk mensosialisasikan program, visi dan misi calon, dari visi dan misi calon setidaknya pemilih memiliki gambaran program yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang kalau terpilih menjadi walikota Semarang, akan tetapi pemahaman pemilih terhadap calon walikota Semarang tentang latar belakang calon walikota Semarang dari hasil penelitian ternyata sebagian besar pemilih tidak mengetahui latar belakang calon. Kurangnya pemahaman pemilih terhadap latar belakang calon tentunya akan mempengaruhi pilihan, selain melihat latar belakang misalkan dari pendidikan calon walikota, pemilih juga melihat visi dan misi dari masing-masing kontestan. Visi dan misi setidaknya memberikan gambaran tentang rencana program kerja yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi walikota. Visi dan misi sering dilihat dari poster atau baliho yang dipasang pada masa kampanye, atau dari iklan baik di radio maupun televisi. Visi dan misi merupakan bentuk kontrak politik antara walikota dengan masyarakat.

Visi-misi, *track record*, dan pengalaman pemilih dalam menggunakan

hak pilih pada pemilu sebelumnya juga berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Hasil penelitian tentang pengalaman pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menggunakan hak pilih. Sebagaimana besar pemilih sudah pernah menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislative, sementara hak untuk memilih walikota belum pernah menggunakan, artinya pada pemilihan wali kota Semarang, merupakan hak pilih pertama kalinya untuk memilih kepala daerah. Pemilihan walikota di Semarang merupakan implementasi aturan dari pilkada serentak.

2) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemilih pemula dalam pemilihan wali kota kota Semarang*

Keputusan untuk menggunakan hak pilih dan menentukan pilihan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon walikota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan aktualisasi calon terhadap Visi dan misi ketika terpilih
- b. Latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama)
- c. Factor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat
- d. Kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya
- e. *Track record* calon

- f. Faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum)

Selain atas dasar faktor-faktor tersebut di atas, faktor paksaan dari orang tua, kerabat, juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilihan walikota Semarang. Responden yang belum atau tidak punya pilihan sendiri, lebih mempercayakan pilihan kepada orang tua atau kerabat dengan alasan orang tua mereka lebih pengalaman dalam menggunakan hak pilih. Money politik selalu ada dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, anggota legislatif, maupun pemilihan wali kota. Responden ketika ditanya tentang money politik, sebagian besar mengetahui tentang money politik. Ada responden yang mengakui akan menerima jika ia diberikan sejumlah uang atau barang pada saat pemilihan walikota Semarang, namun tidak pasti akan memilih calon yang sudah memberikan uang maupun bentuk gratifikasi lainnya, akan tetapi ada juga responden yang tidak akan menerima uang dan gratifikasi dalam bentuk apapun, karena money politik adalah awal dari korupsi. Pemilih berharap siapapun walikota yang jadi pada pemilihan walikota Semarang, akan mampu menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di kota Semarang.

Kesiapan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Walikota Semarang dapat dikatakan belum maksimal, walaupun sebagian besar akan menggunakan hak pilih pada

pemilihan walikota Semarang, akan tetapi alasan responden dalam menentukan pilihan masih belum pasti, bahkan masih ada yang belum menentukan pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan. Pemilih pemula di satu sisi merupakan jenis pemilih yang bisa menjadi pemilih kritis, karena pemilih pemula sudah tergolong usia remaja menuju dewasa. Usia dewasa merupakan usia dimana semangat sangat tinggi, masih idealis dalam mempertahankan opini, dan komitmen mereka.

Pemilih pemula yang kritis sudah pasti akan menggunakan hak pilih dengan menganalisis dan ikut mengkritisi kinerja pemerintahan. Jenis pemilih pemula yang seperti ini biasanya adalah pemilih yang memiliki pendidikan tinggi dan juga aktif dalam organisasi. Disisi lain pemilih pemula karena baru menggunakan hak pilih yang pertama cenderung lebih mudah untuk dipengaruhi. Jenis pemilih ini biasanya pemilih yang tidak memiliki kesadaran penuh untuk menggunakan hak pilih dengan baik. Faktor yang mendorong adalah kurangnya minat terhadap dunia politik, sehingga dalam menentukan pilihan mereka cenderung pasrah dan mengikuti pilihan orang lain.

Kesiapan pemilih pemula ditentukan oleh kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilih dengan maksimal. Artinya dalam menentukan pilihan pemilih benar-benar menganalisis secara cerdas, dengan harapan akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu melaksanakan dan menjalankan amanah dengan baik. Kesadaran tersebut juga

tidak bisa lepas dari pendidikan politik, pendidikan politik memiliki peranan yang sangat penting khususnya bagi pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula lebih mudah untuk dipengaruhi. Pendidikan politik bisa diberikan oleh KPU, atau melalui pendidikan formal, misalnya di sekolah dan perguruan tinggi. Ketika pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik, secara tidak langsung ada usaha untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemilih pemula untuk menentukan pilihan dengan cerdas, khususnya pada pemilihan walikota Semarang.

Pemilih pemula di Kota Semarang menentukan keputusan politik atas pertimbangan faktor-faktor tertentu, diantaranya adalah figur calon walikota. Hasil penelitian menyatakan mengetahui figur calon walikota yang akan mereka pilih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui tim sukses calon walikota, maupun dari stiker, baliho yang memasang foto calon walikota). Pemilih yang mengetahui figur calon walikota secara langsung pada umumnya adalah masyarakat pemilih yang tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan calon walikota, sedangkan bagi masyarakat pemilih yang tidak mengetahui figur calon walikota pada umumnya pemilih yang di daerah pemilih tidak ada warga yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sehingga mereka mengetahui figur calon walikota hanya dari stiker, baliho yang memasang foto calon walikota, dari tim sukses calon walikota, serta isu yang tersebar di masyarakat. Ada pula masyarakat yang memilih karena dasar pertimbangan pada profil/latar belakang calon walikota

misalnya pendidikan calon walikota, *image* calon walikota di masyarakat, dengan alasan orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan *image* yang positif akan mampu menjadi pemimpin yang baik.

Faktor lainnya adalah program yang ditawarkan. Ketika responden/masyarakat pemilih ditanya mengenai tahu/tidaknya terhadap program yang ditawarkan, hasil wawancara menunjukkan pemilih mengetahui program yang ditawarkan oleh calon walikota. Masyarakat mengetahui program yang ditawarkan dari calon walikota secara langsung pada saat kampanye, maupun melalui tim sukses calon walikota, namun ada juga pemilih yang tidak mengetahui program yang ditawarkan.

Faktor lainnya, adalah pilihan keluarga, walaupun hanya beberapa responden yang mengaku memilih calon walikota berdasarkan pada pilihan keluarga/sama dengan pilihan keluarga, selain factor pilihan keluarga mendasarkan pilihan atas dasar kesamaan agama atau ideologi dengan calon walikota dengan pemilih. Kesamaan agama atau ideology juga dijadikan salah satu pertimbangan, dengan harapan ketika agama dan ideology mereka sama dengan calon walikota yang dipilih, maka akan menghasilkan tujuan yang sama, akan mencapai tujuan yang sama. Secara tidak langsung, maka tujuan masyarakat pemilih juga akan tercapai.

Faktor *money politik* yang seringkali ada pada saat pemilihan umum, responden mengaku akan menerima sejumlah uang atau barang yang diberikan

oleh calon walikota, akan tetapi belum tentu akan memberikan suaranya pada calon yang telah memberikan uang. Selain itu calon pemilih mengaku, biasanya tidak hanya menerima uang dari satu calon walikota saja melainkan dari beberapa calon walikota, sehingga masyarakat masih mempertimbangkan alasan lain dalam memilih calon walikota, misalnya atas dasar figur calon walikota, program yang ditawarkan, profil calon walikota, dan lain sebagainya. sedangkan responden yang memilih calon walikota karena telah diberikan sejumlah uang adalah dengan alasan balas budi karena telah diberikan sejumlah uang.

Tabulasi angket yang telah disebarakan untuk pelaksanaan pemilihan walikota di Kota Semarang dapat disimpulkan masyarakat di Kota Semarang telah melihat program kerja, melalui visi dan misi yang ditawarkan oleh calon walikota. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prosentasi pemilih yang menempatkan program kerja dan visi misi sebagai acuan utama. Program yang ditawarkan dapat mereka peroleh dari calon walikota pada waktu kampanye, serta dari tim sukses calon walikota. Memilih program yang ditawarkan masyarakat berharap, akan mendapatkan pemimpin yang sesuai, yang mampu menyalurkan aspirasi serta membawa pengaruh kepada kehidupan mereka. Masyarakat seringkali melihat kinerja pemerintah sebelumnya, baik melalui media-media elektronik seperti Televisi, serta media massa seperti Koran, dengan berbagai masalah yang ada tak sedikit pula masyarakat yang tidak percaya, kecewa, terhadap wakil-wakil rakyat, akan

tetapi disatu sisi masyarakat juga berkeinginan untuk menciptakan pemimpin yang loyal kepada rakyat, sehingga itu dalam memilih calon walikota mereka mulai berfikir rasional.

Opini publik seringkali menempatkan faktor *money politic* sebagai alasan utama masyarakat dalam memilih calon walikota, namun faktor *money politic* tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau penentu calon walikota mampu memenangkan pemilu. Hal ini dikarenakan masyarakat (pemilih) tidak hanya menerima uang dari satu calon saja, akan tetapi juga dari pesaing/calon walikota yang lain, maka dari itu faktor *money politic* tidak bisa dijadikan sebagai faktor utama, walaupun memang ada masyarakat yang masih menjadikan faktor *money politic* sebagai faktor penentu dalam menentukan pilihan politik. Pada umumnya mereka adalah pemilih yang belum mempunyai kesadaran politik, tingkat pendidikan rendah, atau karena perasaan tidak percaya, kecewa kepada kepala daerah.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah,

1. Kesiapan pemilih pemula dalam menentukan pilihan dalam pemilihan walikota Semarang dapat disimpulkan, belum memiliki kesiapan yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan hanya sebagian pemilih yang melakukan persiapan untuk menentukan pilihan dengan mencari tahu visi misi, program yang ditawarkan oleh calon walikota Semarang, dan masih ada pemilih yang tidak melakukan persiapan sama

sekali dalam menentukan pilihan pada pemilihan walikota Semarang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan calon walikota Semarang adalah kejelasan dan aktualisasi calon terhadap Visi dan misi ketika terpilih, Latar belakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat, Kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon *incumbent*), dan kinerja pada pekerjaannya, *Track record* calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1995-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Aswar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfar Muhammad, 2006, *Mendesain Manajemen Pemilukada*, Surabaya, Pustaka Eureka.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cholisin dkk. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Pres.

- Duverger, Maurice. 2000. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Igbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sastroatmodjo, Sudijono. *Dalam seminar Politik Transaksional Ancaman Terhadap Demokrasi*, Kamis 2 April 2009.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam dan Thohari Ahsin. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jurnal, artikel, bahan ajar:**
- Janedjri Gaffar M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press (Konpres).
- Ibnu Hastomo Setyo, 2012, "Bunga Rampai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 4.
- Mahfud MD, 2011. *Risalah Rekaman Konferensi Pers akhir tahun 2010* Membangun Demokrasi Substantif meneguhkan integritas konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Setiajid. 2011. *Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2009 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang)*. Dalam *Jurnal Integralistik*. Volume 22. No 1. Hal 20.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Politik. Bahan Ajar Pendidikan Politik*. PKn. Fis. Unnes.
- Zuhro Siti, MA. 2012, *Memahami Demokrasi Lokal : Pemilukada, Tantangan Dan Prospeknya*, *Jurnal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 4.
- Topo Santoso, 2011, "Problem Desain Penanganan dan Pelanggaran Pidana Pemilu", *Jurnal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 1.
- The Indonesian Power for Democracy (TIM IPD), 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia*, IPD Indonesia, Yogyakarta.
- _____ 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Veri Junaidi, "Sengketa Administrasi Pemilu". *Jurnal Perkumpulan Demokrasi dan Pemilu*. Esisi 1. Tahun 2011.
- Undang-undang no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota